BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kerja praktek yang telah dilakukan oleh penulis pada KBM Industri Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Alur Implementasi Sistem Manajemen Kinerja pada KBM Industri Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten dilaksanakan dengan tahapan waktu dan proses pelaksanaan yang telah di atur oleh perusahaan dimulai pada awal tahun dengan proses perencanaannya, pertriwulan dengan proses pemantauan serta pada akhir tahun merupakan bagian dari proses penilaian baik reward ataupun punishment.
2. Implementasi Sistem Manajemen Kinerja (SMK) pada KBM Industri Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten sangat terintegrasi dalam pencapaiannya yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, nilai kerja yang saling berkesinambungan sehingga menghasilkan karir, apresiasi kinerja dan pelatihan/pengambangan yang menjadikan pegawai KBM Industri Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten lebih termotivasi untuk melakukan tanggung jawabnya terhadap perusahaan.
3. Hambatan Implementasi Sistem Manajemen Kinerja pada KBM Industri Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten yaitu formulir dan tata cara

penilaian sering kali sulit di mengerti dimana kriteria-kriteria yang di gunakan tidak jelas pengertiannya.

4.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan kesimpulan diatas diharapkan dapat memberi masukan,bagi KBM Industri Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten diantaranya :

1. Alur Implementasi Sistem Manajemen Kinerja pada KBM Industri Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten haruslah memberikan informasi yang jelas bagi pegawai sehingga dapat terus di jalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. KBM Industri Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten hendaknya selalu melakukan perbaikan sistem manajemen kinerja secara terus menerus kepada pegawai agar pegawai mengetahui dengan jelas setiap tanggung jawab yang diberikan sehingga tercapai tujuan pegawai secara individu dan perusahaan.
3. Agar formulir penilaian isinya mudah dimengerti dan tata cara penilaian yang tidak berbelit-belit, untuk mencegah keengganan berbagai pihak yang akan menerapkannya.